

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamantkan pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian urusan pemerintah Bidang Bina Perdagangan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pasar mencakup :

1. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan, yakni :
  - a) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, b) Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), c) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW), d) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, e) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota, f) Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, g) Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
2. Sub Bidang Sarana Prasarana, Retribusi dan Parkir, yakni :
  - a) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan,
  - b) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Sub Bidang Sarana dan Pemasaran, yakni :
  - a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota, b) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota, c) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/kota, d) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

4. Sub Bidang Usaha Perdagangan, yakni : a) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota, b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota).
5. Sub Bidang Perlindungan Konsumen, yakni : Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi :



Penetapan rencana strategis program dan rencana kerja Dinas Perdagangan



Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang urusan perdagangan serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan



Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan



Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perdagangan

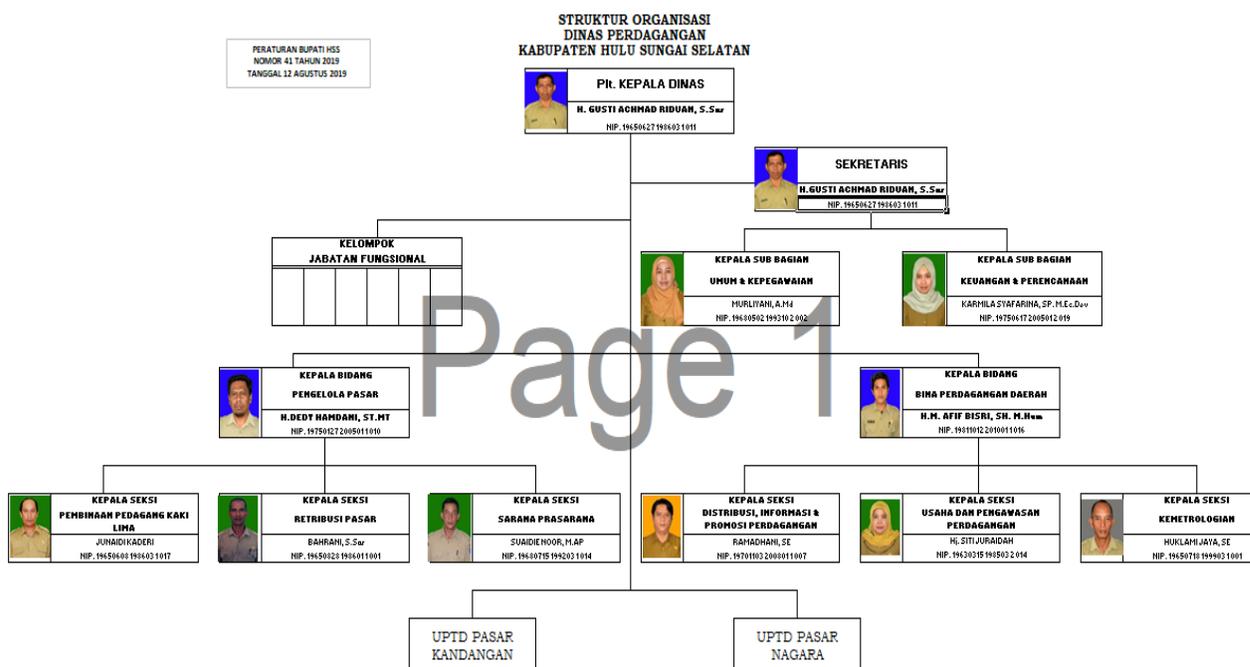
## 1.2 Organisasi Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi, pengawasan perdagangan, kemetrolgian, Informasi perdagangan dan promosi potensi unggulan daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan dasar Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka fungsi Dinas Perdagangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi pengawasan perdagangan, kemetrolgian, Informasi dan promosi perdagangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi, pengawasan perdagangan, kemetrolgian, Informasi dan promosi perdagangan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi, pengawasan perdagangan, kemetrolgian, Informasi dan promosi perdagangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi, pengawasan perdagangan, kemetrolgian, Informasi dan promosi perdagangan;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Perdagangan tergambar pada gambar 2.1 di bawah ini :



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019

**Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan**

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya sarana distribusi perdagangan yang memadai untuk mendukung pemenuhan dan peningkatan ketersediaan wadah usaha bagi pedagang/masyarakat pedagang.
2. Belum terbentuknya jaringan distribusi perdagangan yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
3. Pasca diberlakukannya UU nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan untuk melakukan pelayanan Tera dan Tera Ulang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota, dimana kewenangan sebelumnya ada pada pemerintah propinsi.
4. Terkait permasalahan RPJMD bahwa Target Pendapatan Asli Daerah terutama Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang belum tercapai menjadi permasalahan yang perlu ditangani dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Dinas Perdagangan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah/perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018 – 2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai

bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Perdagangan pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Daya Saing Ekonomi Daerah.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, masih berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, konsistensi peningkatan investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum mampu menjawab tingginya permintaan yang ada. Kondisi-kondisi tersebut memaksa perangkat daerah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal. Positifnya, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami konsistensi penurunan. Perdagangan sebagai salah satu pendukung unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah sepatutnya juga menjadi motor penggerak produktif

perekonomian daerah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, kontribusi penerimaan PDRB melalui komoditas perdagangan belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya perluasan jaringan kemitraan yang belum optimal atau daya dukung infrastruktur bidang perdagangan yang masih lemah. Sehingga peningkatan pelayanan guna mendorong kegiatan sektor perdagangan sangat diperlukan, salah satunya adalah kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan.

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis Tuntutan pembangunan modern memaksa perangkat daerah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Dinas Perdagangan masih perlu untuk ditingkatkan.

Hubungan antara tujuan, sasaran, indikator dan target Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perdagangan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran	Target 2018	Target 2019
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,27	5,38

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
2. Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Perdagangan
3. Indek Kepuasan Masyarakat Dinas Perdagangan

Secara lengkap IKU Dinas Perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Tahun 2019 – 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Sekretariat	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah urusan	Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Sekretariat	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Kategori Perdagangan merupakan salah satu indikator dari penyusunan PDRB	Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Bina Perdagangan Daerah	Laporan Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Bina Perdagangan Daerah

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut sebagaimana pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1. SEKRETARIAT (URUSAN LAYANAN/PENUNJANG RUTIN)

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Predikat AKIP	Predikat	81,21 (A)	0	0	0	81,21 (A)
		1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	Persen	100	66,67	77,78	88,89	100
		1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15
		1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12

Pada tabel 2.3, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023. Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,50. Untuk Dinas Perdagangan Kabupaen Hulu Sungai Selatan guna mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 81,21. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (lima belas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu:

No.	Nama Dokumen	Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2 dokumen
5	IKU + SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 Ess II s.d Ess IV dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 Ess II s.d Ess IV dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2019	4 dokumen
10	Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019	1 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
	<b>Jumlah</b>	<b>15 dokumen</b>

Untuk Aspek pemenuhan dokumen – dokumen AKIP, perencanaan target triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 (satu) mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 10, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

No.	Nama Dokumen	Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Renja	1 dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2 dokumen
5	RKA Murni	1 dokumen
6	RKA Perubahan	1 dokumen
7	DPA	1 dokumen
8	Laporan Triwulan	1 dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1 dokumen
10	Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2019	1 dokumen
<b>Jumlah</b>		<b>12 dokumen</b>

Sedangkan Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, perencanaan di target triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dimana pada triwulan 1 (satu) mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 8, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, Dokumen PRA RKA Murni dan Perubahan, RKA Murni, DPA, Laporan Triwulan, terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

2.3.2. BIDANG BINA PERDAGANGAN DAERAH DAN BIDANG PENGELOLA PASAR

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
		1	Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal	Persen	11,05	0	0	0	11,05
		1.1	Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk Unggulan Daerah	Jumlah jaringan pemasaran antar daerah	Kegiatan	6	1	2	4	6
		1.2	Penyuluhan Kemampuan Kewirausahaan Pedagang Non Formal	Jumlah kelompok usaha sektor perdagangan non formal yang dibina	Orang	440	0	0	220	440
		1.3	Pengendalian Harga Bahan Pokok	Jumlah kegiatan penyebaran informasi dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok masyarakat	Kegiatan	3 kegiatan	0	0	2	3
		2	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	PAD sub sektor perdagangan (kemetrolgian)	Rupiah	35.000.000	0	5 jt	8 jt	10 jt
		2.1	Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	PAD sub sektor perdagangan (kemetrolgian)	Rupiah	35.000.000	0	5 jt	8 jt	10 jt
		2.2	Pelayanan Tera dan Tera Ulang							

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target				
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2.3	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	330	0	110	220	330
		3	Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	Persen	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42
				Jumlah PAD sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	Rupiah	3.965.000.000	1,05 M	2,1 M	3,15 M	3,965 M
		3.1	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan	Jumlah jaringan sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	Pasar	7	7	7	7	7
		3.2	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Nagara			3	3	3	3	3
		3.3	Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Kandangan	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	Rupiah	3.700.000.000	925 jt	1,85 M	2,78 M	3,39 M
		3.4	Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Nagara			500.000.000	125 jt	250 jt	375 jt	575 jt

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pada Tabel 2.3.2 Urusan Perdagangan dijelaskan bahwa tujuan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas Perdagangan, maka disusun program urusan Perdagangan, yaitu :

1. Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan, dengan target :  
Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal sebesar 11,05 persen
2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan target : PAD sub sektor perdagangan (kemetrolagian) sebesar Rp.10.000.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan, dengan target :
  - a. Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik, sebesar 97,42%.
  - b. Jumlah PAD sub sektor perdagangan (pelayanan pasar), sebesar Rp.3.965.000.000,-.

Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan mempunyai 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- 1) Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk Unggulan Daerah, dengan target 6 kegiatan, target triwulan I sebanyak 1 kegiatan, target triwulan II sebanyak 2 kegiatan, target triwulan III sebanyak 4 kegiatan dan target triwulan IV sebanyak 6 kegiatan. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.
- 2) Penyuluhan Kemampuan Kewirausahaan Pedagang Non Formal, dengan target 440 orang, triwulan I dan triwulan II tidak ada target, target triwulan III sebanyak 220 orang dan target triwulan IV sebanyak 440 orang. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.
- 3) Pengendalian Harga Bahan Pokok, dengan target 3 kegiatan, triwulan I dan triwulan II tidak ada target, target triwulan III sebanyak 2 kegiatan dan target triwulan IV sebanyak 3 kegiatan. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.

Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, mempunyai 3 (tiga) kegiatan, dimana 2 (dua) kegiatan mempunyai indikator dan target yang sama yaitu :

- 1) Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan, dengan target Rp.10.000.000,-, triwulan I belum ada target, target triwulan II sebanyak Rp.5.000.000,-,

target triwulan III sebanyak Rp.8.000.000,- dan target triwulan IV sebanyak Rp.10.000.000,-. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.

- 2) Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dengan indikator dan target sama dengan kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan.
- 3) Sosialisasi Perlindungan Konsumen, dengan target 330 orang, triwulan I belum ada target, target triwulan II sebanyak 110 orang, target triwulan III sebanyak 220 orang dan target triwulan IV sebanyak 330 orang. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.

Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan mempunyai 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- 1) Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan dengan target 7 pasar, dimana target pertriwulan sama, karena pasar yang ditargetkan adalah semua kegiatan per hari yang dilaksanakan. Dalam kegiatan ini salah satunya adalah kebersihan pasar. Untuk kebersihan pasar dilaksanakan per hari.
- 2) Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Nagara. Sama dengan kegiatan pada Pasar Kandangan, tetapi jumlah target berbeda, yaitu 3 pasar.
- 3) Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Kandangan, dengan target sebanyak Rp.3.390.000.000,-, Target triwulan I sebanyak Rp.925.000.000,-, target triwulan II sebanyak Rp.1.850.000.000,-, target triwulan III sebanyak Rp.2.780.000.000,- dan target triwulan IV sebanyak Rp.3.390.000.000,-. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.
- 4) Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Nagara, dengan target sebanyak Rp.575.000.000,-, Target triwulan I sebanyak Rp.125.000.000,-, target triwulan II sebanyak Rp.250.000.000,-, target triwulan III sebanyak Rp.375.000.000,- dan target triwulan IV sebanyak Rp.575.000.000,-. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), juga tidak terlepas dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut. Sehingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan tujuan dan sasaran.

Pada bab ini akan disajikan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama dua triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Tahun 2019 serta realisasi anggaran Tahun 2019.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2019

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Predikat AKIP	Predikat	81,21 (A)	0	0	0	81,21 (A)	0	0	0	0	100	100	100	0
		1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	Persen	100	66,67	77,78	88,89	100	66,67	77,78	88,89	100	100	100	100	100
		1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15	10	11	13	15	100	100	100	100
		1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12	8	10	11	12	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, Pencapaian Kinerja Urusan Kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada akhir tahun 2019 ini realisasi yang ada dapat dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran yang disampaikan pada triwulan 4 (empat) merupakan hasil akhir. Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 11 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian Dinas Perdagangan target Triwulan 4 telah bisa diukur dimana tahap ini sudah hasil akhir dari seluruh tahapan kegiatan. Dinas Perdagangan melakukan pelayanan publik secara langsung, dimana Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan kepada pedagang berupa pelayanan pembayaran retribusi took, pelayanan kebersihan dan pelayanan konsumen lainnya dan pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga kami target pada triwulan 4, dimana masih belum bisa diukur karena hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum dilakukan.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 100% atau 27 (dua puluh tujuh) dokumen dari total jumlah 27 (dua puluh tujuh) dokumen, dimana 15 (lima belas) dokumen untuk Penyusunan Dokumen AKIP dan 12 (dua belas) dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan. Dari Kegiatan Penyusunan AKIP, telah dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) dokumen di Triwulan IV, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Nama Dokumen	Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2 dokumen
5	IKU + SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 Ess II s.d Ess IV dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 Ess II s.d Ess IV dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulanan Tahun 2019	4 dokumen
10	Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019	1 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
<b>Jumlah</b>		<b>15 dokumen</b>

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan IV sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

No.	Nama Dokumen	Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Renja	1 dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2 dokumen
5	RKA Murni	1 dokumen
6	RKA Perubahan	1 dokumen
7	DPA	1 dokumen
8	Laporan Triwulan	1 dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1 dokumen
10	Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2019	1 dokumen
<b>Jumlah</b>		<b>12 dokumen</b>

Pada indikator kinerja program Dinas Perdagangan target ditiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir Tahun.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran untuk Urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG BINA PERDAGANGAN DAERAH DAN BIDANG PENGELOLAAN PASAR TAHUN 2019

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,27	5,27	5,27	4,84*	97,96	97,96	97,96	89,96
		1	Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	Persen	11,05	0	0	0	11,05	0	0	0	11,05	0	0	0	100
		1.1	Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk Unggulan Daerah	Kegiatan	6	1	2	4	6	0	2	4	7	0	100	100	116,67
		1.2	Penyuluhan Kemampuan Kewirausahaan Pedagang Non Formal	Orang	440	0	0	220	440	0	0	220	440	0	0	100	100
		1.3	Pengendalian Harga Bahan Pokok	Kegiatan	3 kegiatan	0	0	2	3	0	0	2	3	0	0	100	100
		2	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rupiah	10 juta	0	10 jt	10 jt	10 jt	0	2,31 juta	15,04 juta	15,74 juta	0	23,1	150,4	157,4

		2.1	Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	PAD sub sektor perdagangan (kemetrolgian)	Rupiah	35.juta	0	10 jt	10 jt	10 jt	0	2,31 juta	15,04 juta	15,74 juta	0	23,1	150,4	157,4
		2.2	Pelayanan Tera dan Tera Ulang															
		2.3	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	330	0	110	220	330	0	110	220	330	0	100	100	100
		3	Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	Persen	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	100	100	100	100
				Jumlah PAD sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	Rupiah	3,965 M	1,05 M	2,10 M	3,15 M	3,965 M	0,94 M	1,89 M	2,82 M	3,898 M	89,52	90,00	89,52	98,31
		3.1	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandang	Jumlah jaringan sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	Pasar	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100
		3.2	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Nagara			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100
		3.3	Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Kandang	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	Rupiah	3,7 M	925 jt	1,85 M	2,78 M	3,39 M	686,7 juta	1,46 M	2,18 M	3,074 M	74,24	78,92	78,42	90,68
		3.4	Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Nagara			575 juta	125 juta	250 j juta	375 juta	575 juta	247,5 juta	428,5 juta	626,6 juta	809,3 juta	197,9	171,4	167,09	140,7

\* angka sangat sementara

Pada tabel di atas, pencapaian kinerja urusan perdagangan sebagai tujuan strategis yaitu Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 belum bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena berdasarkan atas Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dimana untuk akhir tahun 2019 ini didapatkan bahwa untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor didapat angka sangat sementara adalah 4,84%.

Sedangkan untuk bidang Bidang Perdagangan Daerah yang mempunyai 2 (dua) program dengan 6 (enam) kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada target Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan belum dapat dicapai, karena merupakan bentuk gambaran dari kegiatan selama setahun. Sedangkan untuk target perkegiatan dapat di uraikan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk Unggulan Daerah dengan target 6 (enam) kegiatan, yaitu Expo dalam rangka HUT TMII, Expo dalam rangka Festival Banjar di Jakarta, Kalsel Expo dan Harganas Expo 2019, STQ/MTQ Bazar dan Expo, HSS Expo dan KSN Expo. Jadi realisasi kegiatan 7 (tujuh) kegiatan sehingga capaian kinerja tahun 2019 mencapai 116,67%.
  - b. Kegiatan Penyuluhan Kemampuan Kewirausahaan Pedagang Non Formal dengan target 440 orang, sesuai dengan jadwal yang direalisasikan sebanyak 440 orang, sehingga capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%.
  - c. Kegiatan Pengendalian Harga Bahan Pokok dengan target 3 kegiatan dimana realisasi sebanyak 3 kegiatan juga, sehingga capaian kinerja 100%.
2. Pada target Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan sebesar Rp10.000.000,00 telah dicapai sebesar Rp15.740.000,00, kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai penjadwalan pada program ini, sehingga capaian kinerja sebesar 157,4%. Sedangkan untuk target perkegiatan dapat di uraikan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan dengan realisasi pada akhir tahun 2019 sebesar Rp15.740.000,- sesuai dengan kegiatan yang dijadwalkan, sehingga capaian kinerja mencapai 157,4%.
  - b. Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan realisasi pada akhir tahun 2019 sebesar Rp15.740.000,- sesuai dengan kegiatan yang dijadwalkan, sehingga capaian kinerja mencapai 157,4%.

- c. Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen dengan realisasi pada akhir tahun sebanyak 330 orang sesuai jadwal kegiatan Sosialisasi pada triwulan IV ini, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
3. Pada target Program Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan dengan 2 (dua) target yaitu Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik sudah dapat dicapai sebesar 97,42% karena merupakan rutinitas kegiatan yang harus dilaksanakan dan target kedua yaitu Jumlah PAD Sub Sektor Perdagangan (Pelayanan Pasar) sebesar Rp3.965.000.000,- dengan realisasi Rp3.898.906.771,00 maka capaian kinerja sebesar 98,31%. Sedangkan untuk target perkegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan dengan realisasi pada akhir tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) pasar karena merupakan rutinitas kegiatan setiap hari seperti kebersihan pasar, penertiban pedagang dan kegiatan lainnya, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
  - b. Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Nagara dengan realisasi pada akhir tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) pasar karena merupakan rutinitas kegiatan setiap hari seperti kebersihan pasar, penertiban pedagang dan kegiatan lainnya, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
  - c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Kandangan dengan realisasi pada akhir tahun 2019 sebesar Rp3.073.879.121,00 capaian kinerja sebesar 90,68%.
  - d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Nagara dengan realisasi pada akhir tahun 2019 sebesar Rp809.287.650,00, capaian kinerja sebesar 140,7%.

Rangkuman capaian kinerja dari keseluruhan hasil capaian kinerja urusan/bidang terkait yang ada pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3**  
**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun 2019	Target				Realisasi Triwulanan				Status	Keterangan
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	Predikat	81,21 (A)	0	0	0	81,21 (A)	0	0	0	0		Capaian Target di awal tahun berikutnya
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,27	5,27	5,27	4,84*		

Keterangan :

	Capaian > 100%
	Capaian >90% - 100%
	Capaian >75% - 90%
	Capaian <50%

\* angka sangat sementara dari BPS

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, indikator sasaran yang pertama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi pencapaian realisasi sama dengan target atau dengan kata lain tercapai 100%. Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran ke dua yaitu predikat AKIP realisasi ditargetkan pada awal tahun berikutnya karena baru akan dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Untuk indikator ke 3 (tiga) yaitu Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor adalah hasil sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS) masih dengan angka sangat sementara.

### **3.2 Capaian Keuangan Organisasi**

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Total Pagu Anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp9.686.332.000,00 dan Realisasi anggaran pada akhir Tahun 2019 Bidang Bina Perdagangan Daerah sebesar Rp2.282.091.200,00, Bidang Pengelolaan Pasar sebesar Rp4.306.373.086,00 dan Sekretariat sebesar Rp2.565.868.034,00. Adapun rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2019**  
**BERDASARKAN URUSAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

1. Kesekretariatan (layanan penunjang perangkat daerah)

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu 1 Tahun	Target				Realisasi Keuangan				Capaian Target Rencana Belanja (%)				Capaian Realisasi Keuangan (%)			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.758.774.000	976.559.500	621.990.000	502.679.500	657.545.000	462.327.378	1.082.083.580	1.590.149.186	2.565.868.034	47,34	67,69	75,68	92,69	18,82	44,05	57,64	92,69
1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.520.000	5.660.000	0,00	3.860.000	0,00	533.140	2.261.890	4.926.640	9.508.890	9,42	39,96	51,75	99,88	5,6	23,76	51,75	99,88
<i>Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat)</i>																	
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,857,174,500	744,389,500	461,240,000	399,700,000	251,845,000	432.623.138	867.026.090	1.290.231.426	1.795.447.844	58,12	71,91	80,37	96,68	23,03	46,15	69,47	96,68
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	458,467,000	61,200,000	13,950,000	24,417,000	358,900,000	14.121.100	41.138.100	57.136.200	388.099.300	23,07	54,74	57,38	84,65	10,48	30,54	42,41	84,65
4 Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	433.612.500	165.310.000	146.800.000	74.702.500	46.800.000	15.050.000	171.657.500	289.277.500	372.812.000	9,10	54,99	74,59	85,98	3,47	39,59	66,71	85,98

Pada tabel 3.4, untuk kesekretariatan, Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan perdagangan dengan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat) pada Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp9.520.000,00 dengan target sebesar Rp9.520.000,00. Untuk realisasi keuangan sudah terealisasi sebesar Rp9.508.890,00 sehingga capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan sebesar 99,88%.

Kemudian untuk Program Pelayanan Administrasi Kantor, dengan pagu Rp1.878.669.500,00 dengan target sebesar Rp1.878.669.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.795.447.844,00, sehingga capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan sebesar 96,68%.

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pagu Rp458.467.000,00. dengan target sebesar Rp458.467.000,00. dan realisasi keuangan sebesar Rp388.099.300,00, sehingga capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan sebesar 84,65% .

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu Rp433.612.500,00 dengan target sebesar Rp433.612.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp372.812.000,00, sehingga capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan sebesar 85,98%.

**Tabel 3.5**  
**CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN 2019**  
**BERDASARKAN URUSAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

2. Bidang Bina Perdagangan Daerah dan Bidang Pengelola Pasar

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu 1 Tahun	Target				Realisasi Keuangan				Capaian Target Rencana Belanja (%)				Capaian Realisasi Keuangan (%)			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	6.927.558.000	6.132.198.000	3.570.000	550.520.000	241.270.000	136.171.125	489.835.393	3.034.023.298	6.588.464.286	7,88	28,29	45,38	95,11	10,46	21,44	43,79	95,11
1 Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	827,098,000	270,748,000	0,00	546,350,000	10,000,000	0,00	55.052.000	151.635.000	824.148.000	0,00	20,33	18,55	99,64	0,00	6,74	18,33	99,64
2 Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.572.728.000	1.572.728.000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.036.000	959.789.360	1.457.943.200	0,00	15,73	61,03	92,70	0,00	15,73	61,03	92,70
3 Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	4,527,732,000	4,288,722,000	3,570,000	4,170,000	231,270,000	136.171.125	408.747.393	1.922.598.938	4.306.373.086	10,55	31,57	44,75	95,11	10,46	31,38	42,46	95,11

Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sasaran meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, dengan pagu ditahun 2019, yaitu Rp6.927.558. 000,- dari 3 program yang disusun di bidang Bina Perdagangan Daerah dan Bidang Pengelola Pasar.

Untuk Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan dengan pagu Rp827.098.000,00, dengan target sebesar Rp827.098.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp824.148.000,00, sehingga capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan sebesar 99,64%.

Untuk Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan pagu Rp1.572.728.000,00, dengan target sebesar Rp1.572.728.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp1.457.943.200,00, sehingga capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan sebesar 92,70%.

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan dengan pagu Rp4,527,732,000,00, dan target sebesar Rp4,527,732,000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.306.373.086,00, capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan sebesar 95,11%.

Untuk perbandingan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian realisasi kinerja berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

**Tabel 3.6**  
**REALISASI ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI KINERJA**  
**BERDASARKAN URUSAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Sasaran/Program/Kegiatan		Realisasi Anggaran (%)				Realisasi Kinerja (%)				Realisasi Kinerja (%)			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kesekretariatan</b>													
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		18,82	44,05	57,64	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,6	23,76	51,75	99,88	66,67	77,78	88,89	100	11,91	3,27	1,72	1,00
<b>Perdagangan</b>													
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		10,46	21,44	43,79	95,11	97,96	97,96	97,96	89,96	9,37	4,57	2,24	0,95
1	Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	0,00	6,74	18,33	99,64	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	1,00
2	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	0,00	15,73	61,03	92,70	0,00	23,1	150,4	157,4	0,00	0,73	0,82	1,69
3	Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	10,46	31,38	42,46	95,11	100	100	100	100	9,56	3,19	2,36	1,05
						89,52	90,00	89,52	98,31	8,5	2,87	2,11	1,03

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi keuangan Dinas Perdagangan Tahun 2019 dapat digambarkan pada sasaran dan program sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan perdagangan dengan Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi kinerja 100% dengan perbandingan 1,00%. Tetapi indikator kinerja sasaran Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga pada triwulan 4, dimana masih belum bisa diukur karena hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum dilakukan.
2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan program-program:
  - Program Peningkatan usaha sektor perdagangan realisasi kinerja 100% sehingga perbandingan hasil capaian sebesar 1,00%.
  - Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan realisasi kinerja 157,4% dan perbandingan hasil capaian sebesar 1,69%.
  - Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan realisasi kinerja 100% dan 98,31% dan perbandingan hasil capaian sebesar 1,05% dan 1,03%.

Dari presentase hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah hampir mencapai hasil yang optimal dan peningkatan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan

Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun pertama Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih efektif dan efisien.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 31 Desember 2019

**Plt. Kepala Dinas,**

**H. GUSTI ACHMAD RIDUAN, S.Sos**

Pembina

NIP. 19650627 198603 1 011